

REVITALISASI PANCASILA MELALUI DUSUN PANCASILA

Toba Sastrawan Manik*, Samsuri, Sunarso

Prodi PPKn Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta

Email: tobasastrawanmanik@uny.ac.id, samsuri@uny.ac.id, sunarso@uny.ac.id

Abstract

This study aims to reveal the important role of the community in the revitalization of Pancasila. This research is qualitative research with interviews, documentation, and literature study data collection techniques. The research location is Kampung/Dusun Pancasila or Dusun Nogosari, Trirenggo Village, Bantul. The subject of this research is one of the community leaders in the village. This village is also called or once declared as the Dusun Pancasila. The results of this study are the community in the form of community or other important roles in the revitalization of Pancasila. Dusun Nogosari applies Pancasila values in daily life. Community involvement and role in Pancasila revitalization becomes an alternative when the country has not been fully successful. The role of the community as a strategic role when revitalizing Pancasila is associated with local values, culture, and local wisdom. Revitalization of community-based Pancasila or social communities with existing social capital is more practical and implementation. Village-based Pancasila revitalization or social capital needs to be developed and emulated in other regions. This becomes a breakthrough when Pancasila tends to be theoretical and formality.

Keywords: *Bhinneka Tunggal Ika; Pancasila; Social Capital.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya peran masyarakat dalam revitalisasi Pancasila. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Lokasi penelitian ialah Dusun Pancasila atau Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Bantul. Subjek penelitian ini ialah salah satu tokoh masyarakat di dusun Nogosari. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya adalah bahwa masyarakat dalam bentuk komunitas atau lainnya berperan penting dalam revitalisasi Pancasila. Dusun Nogosari menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan dan peran masyarakat dalam revitalisasi Pancasila menjadi alternatif ketika negara belum sepenuhnya berhasil. Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam hal upaya revitalisasi Pancasila ketika dikaitkan dengan nilai, budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Revitalisasi Pancasila berbasis masyarakat atau komunitas sosial dengan modal sosial yang ada lebih praktis dan implementatif. Revitalisasi Pancasila berbasis desa atau modal sosial perlu untuk dikembangkan dan menjadi contoh daerah lain. Hal ini menjadi terobosan manakala Pancasila saat ini cenderung teoretis dan formalitas.

Kata kunci: *Bhinneka Tunggal Ika; Modal Sosial; Pancasila.*

A. Pendahuluan

Banyak yang bertanya kenapa Indonesia dengan wilayah yang luas, keberagaman yang tinggi baik dari suku,

agama, budaya, ras, dan identitas dapat bersatu dalam satu negara? Jawaban normatif yang sering disebutkan ialah karena Indonesia menganut Pancasila. Hal

ini sebenarnya mengamini pernyataan salah satu pendiri bangsa yaitu Soekarno yang mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar yang tepat di mana Indonesia bisa bersatu, bukan Islam, bukan sekuler.

Pancasila berasal dari kata dasar Panca dan Sila. Panca yang berarti lima sedangkan Sila adalah dasar, nilai. Secara sederhana, Pancasila adalah lima nilai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelima nilai dasar tersebut ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Setelah melalui perdebatan dan diskusi panjang dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Panitia Sembilan, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Hal tersebut juga tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan menjadi dasar susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lebih lanjut hal tersebut ditegaskan oleh TAP MPR. No. XVIII/1998 bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi tantangan atau perdebatan secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, masih terdapat titik-titik perdebatan mengenai relasi dan praksis hubungan agama dan negara. Sementara itu dari sisi eksternal, Pancasila menghadapi tantangan masuknya ideologi-ideologi luar yang kurang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat dukungan masyarakat terhadap Pancasila menurun 10% dalam rentan waktu 13 tahun (Fakhrizal, 2018). Dalam rilis yang sama disebutkan bahwa tahun 2005 tingkat masyarakat Pro- Pancasila mencapai 85,2% sedangkan tahun 2018 mencapai 75,3%. Di sisi lain dukungan terhadap ideologi dari luar Indonesia cukup mengkhawatirkan. Menurut Survei Alvira Research Center (DHF, 2018) ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen yang setuju dengan Khilafah sebagai bentuk ideal negara. Data relatif sama dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) bahwa Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Hal ini menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.

Negara sebenarnya sudah mengantisipasi dinamika di atas lewat berbagai kebijakan. Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah sebuah respon positif untuk merevitalisasi Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Perpres No. 7 Tahun 2018 Tentang BPIP itu sendiri. Dalam Perpres tersebut disebutkan BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Kehadiran BPIP menjadi pelengkap secara struktural dalam

sistem kelembagaan Indonesia dalam upaya mensosialisasikan Pancasila.

Perlu disadari bahwa upaya revitalisasi Pancasila tidak hanya menjadi kewajiban negara. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban moral untuk menjaga, melestarikan, dan mengimplementasikan Pancasila. Pancasila tidak hanya sebatas ideologi dan dasar negara yang berfungsi sebagai rambu-rambu kehidupan bernegara. Lebih dari itu, Pancasila ialah kepribadian, identitas, dan jati diri bangsa. Peran individu, publik, dan komunitas penting untuk merevitalisasikan Pancasila. Masyarakat menjadi kalangan yang memiliki peran penting dalam dalam menegakkan ideologi bangsa.

Berdasarkan paparan urgensi revitalisasi Pancasila dan eksistensi masyarakat, Penulis tertarik untuk meneliti tentang peran masyarakat dalam merevitalisasikan Pancasila di tengah tantangan arus global dan lokal saat ini. Dalam penelitian ini, Penulis akan meneliti peran masyarakat Trirenggo dalam upaya revitalisasi Pancasila. Desa Trirenggo adalah desa di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Desa Trirenggo merupakan salah satu Desa yang mendapatkan predikat sebagai Desa Pancasila. Dalam penelitian ini, Penulis ingin meneliti seputar latar belakang berdirinya Kampung Pancasila, bentuk implementasi Pancasila, serta bentuk pendidikan dan revitalisasi Pancasila.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang dilakukan karena ditemukannya kasus atau fenomena yang dianggap menarik untuk diteliti atau sesuatu yang baru yakni sesuatu yang bisa membantah teori atau memberikan alternatif terhadap suatu fenomena (Sarosa, 2012) Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Validasi data dilakukan

dengan triangulasi teknik yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan salah satu deklarator Dusun Nogosari sebagai Dusun Pancasila termasuk Tokoh Masyarakat, Untoro (51 thn). Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen dari *youtube* dengan penelitian yang sama. Penelitian diadakan Desember 2019 di Dusun Nogosari, Kabupaten Sleman, DIY. Data dianalisis menggunakan model atau tahapan Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono: 2015)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Pancasila dan Pentingnya Revitalisasi Pancasila

Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting dalam peradaban bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pijakan sekaligus pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Jika dunia terbelah dalam dua kutub ideologis yakni Liberal atau Komunis, Indonesia mengenalkan konsep yang relatif baru dan visioner yang disebut dengan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya bermuatan nilai-nilai lokal dan tradisional Indonesia, namun juga mencakup nilai-nilai global dan universal baik dalam konsep humanistik maupun politik kontemporer.

Secara internal Indonesia, Pancasila merupakan nilai, dasar, dan paham yang diyakini mampu menjadi pemersatu segala perbedaan dan dinamika politik sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Secara historis, kelima sila Pancasila merupakan perpaduan atau sintesis dari keragaman keyakinan paham dan harapan yang berkembang di Indonesia. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran

agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebinekaan atau aspirasi identitas kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis dari segala paham keadilan sosial ekonomi. Dengan demikian, Pancasila dianggap merupakan ideologi paling tepat di Indonesia.

Ideologi menurut Latif (2015) ialah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian pengertian dasar. Ideologi juga bisa dimaknai sebagai pola atau cara berpikir (Heywood, 2017). Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Antoine Destutt de Tracy (Vincent, 2010). Sekalipun tidak ada definisi yang tegas dari Tracy tentang ideologi itu sendiri, namun ada 4 konsep ideologi yang diperkenalkan oleh Tracy yakni sebagai ide-ide pengetahuan (*science of ideas*), merujuk pada liberal republikan, gerakan radikal intelektual, dan doktrin politik (Vincent, 2010).

Menurut Zmantel (2008) ideologi merupakan pandangan luas tentang sifat 'politik', dan masyarakat yang baik. Pengertian ideologi yang relatif sama dikatakan oleh Freden (2003) bahwa ideologi merupakan rangkaian berpikir yang bersifat artifisial, dimanipulasi oleh kekuasaan dan kekuasaan yang ingin dituju.

Harus diakui bahwa tidak ada definisi ideologi yang baku dan universal yang bisa diterima semua kalangan (Heywood, 2017; Camargo, 2013; Eagleton, 1991) definisi ideologi tidak lain hanya kumpulan-kumpulan definisi yang berseberangan sama satu lain yang memunculkan

kebingungan dan perdebatan (Heywood, 2017). Berdasarkan hal tersebut, (Heywood, 2017) mencoba merangkum beberapa definisi ideologi yakni: (a) *a political belief system*; (b) *an action-orientated set of political idea*; (c) *the ideas of the ruling class*; (d) *the world-view of a particular social class or social group*; (e) *political ideas that embody or articulate class or social interests*; (f) *ideas that propagate false consciousness among the exploited or oppressed*; (g) *ideas that situate the individual within a social context and generate*; (h) *a sense of collective belonging an officially sanctioned set of ideas used to legitimize a political system or regime*; (i) *an all-embracing political doctrine that claims a monopoly of truth*; (j) *an abstract and highly systematic set of political ideas*.

Dengan cakupan lebih luas Eagleton (1991) juga mencoba merangkum beberapa definisi yang berkembang seputar tentang ideologi. Menurutnya setidaknya ada beberapa daftar yang definisi yakni sebagai (a) proses produksi makna, simbol, dan nilai dalam kehidupan sosial; (b) kumpulan ide yang merupakan karakteristik dari kelompok atau kelas sosial tertentu; (c) ide-ide yang membantu sebagai alat legitimasi kekuatan politik yang dominan; (d) cita-cita palsu yang membantu legitimasi; (e) kekuatan politik yang dominan; (g) komunikasi yang terdistorsi secara sistematis; (h) yang menawarkan posisi untuk subjek; (i) bentuk pemikiran yang didorong oleh kepentingan sosial; (j) pemikiran identitas; (j) ilusi yang diperlukan secara sosial; (k) hubungan wacana dan kekuasaan; (l) media di mana para aktor sosial yang sadar memahami dunia mereka; (m) berorientasi pada tindakan dari keyakinan yang ditetapkan; (n) kebingungan realitas

linguistik dan fenomenal; (o) penutupan semiotik; (p) media yang sangat diperlukan di mana individu menjalani hubungannya dengan struktur sosial; (q) proses di mana kehidupan sosial diubah menjadi realitas alamiah.

Sekali pun sebagai suatu gagasan yang abstrak, ideologi memiliki peran yang cukup signifikan. Ideologi tidak hanya sebagai alat propaganda saja. Lebih dari itu, Ideologi tidak bersifat pasif. Ideologi mampu tetapi memiliki kapasitas untuk menginspirasi dan membimbing aksi politik itu sendiri dan sebagainya untuk membentuk kehidupan material (Heywood, 2017) Ideologi memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari bahkan terhadap bagian yang materil. Pengaruh ideologi menurut Heywood (Heywood, 2017) setidaknya terdiri dari tiga yakni membentuk pemahaman struktur politik dan menetapkan tujuan serta menginspirasi aktivisme; membentuk sifat sistem politik; dan bertindak sebagai bentuk perekat sosial.

Pancasila sebagai ideologi bisa didefinisikan sebagai lima nilai, dasar, (sila) yang menjadi sumber ide, gagasan, keyakinan, cara pandang serta sistem politik yang digunakan di Indonesia. Sila Pancasila tersebut terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat untuk Indonesia. Pancasila mampu memelihara tradisi tradisional Indonesia, mampu mengatasi masalah-masalah pokok, dan bahkan memberikan kerangka nasional (Dharmaputra, 1988).

Pancasila bukan hanya hasil perenungan, ide, dan logika. Pancasila merupakan hasil kompromi atau konsensus (Maarif, 2006). Lebih jauh dari itu, Pancasila dalam konsep Indonesia diangkat dari nilai-nilai budaya, adat-istiadat, dan nilai-nilai religius yang tersebar di wilayah nusantara (Kaelan, 2016). Oleh karena itu, Pancasila bukan sekadar cita-cita. Pancasila beroperasi atau lebih tepat pengejawantahan nilai masyarakat Indonesia (Dharmaputra, 1988).

Pancasila sebagai sebuah sistem keyakinan, nilai, pengetahuan, dan cara pandang dunia memiliki kedudukan yang fundamental di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Notonagoro Pancasila memiliki derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan dan menjadi asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup yang semestinya dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya (Kaelan, 2016). Ideologi Pancasila mencakup semua sisi kehidupan rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi menghadapi tantangan. Pancasila belum benar-benar diimplementasikan secara massif ke dalam level operasional kebijakan, keteladan, dan tindakan penyelenggaraan negara (Latif, 2015a, 2015b). Hal ini menjadi tantangan serius bagi eksistensi dan legitimasi Pancasila di Indonesia. Meminjam istilah Yudi Latif (Latif, 2015b) revolusi Pancasila atau Istilah Kuntowijoyo bahwa radikalisme Pancasila semakin menjadi suatu keniscayaan. Revolusi atau radikalisme Pancasila harus bersifat terencana, terstruktur, dan masif. Afirmasinya dibutuhkan upaya dan rencana secara akseleratif pada sistem sosial meliputi ranah material mental politikal berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila (Latif, 2015b).

Secara konseptual, Yudi Latif merangkai sejumlah program yang bisa digunakan dalam upaya merevitalisasi Pancasila atau dalam istilahnya “Revolusi” Pancasila. Program-program Revolusi Pancasila ialah sebagai berikut ((Latif, 2015b).

1. Mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.
2. Mengukuhkan negara hukum Pancasila
3. Memperjuangkan kedaulatan dalam politik (penataan kelembagaan negara; penguatan demokrasi permusyawaratan.)
4. Memperjuangkan kemandirian dalam perekonomian (merebut kemerdekaan ekonomi sebagai prasyarat untuk membumikan rencana ekonomi)
5. Memperjuangkan kepribadian dalam Kebudayaan (melakukan revolusi mental)
6. Memperkuat (dukungan) kohesi sosial (melenyapkan struktur sosial masyarakat yang feodalistik dan kolonialistik-kapitalistik yang bersifat diskriminatif.)
7. Memperkuat (Dukungan) Sistem Pertahanan-Kemampuan (mengukuhkan kembali doktrin sishankamrata (sistem pertahanan keamanan rakyat semesta).

2. Sejarah Singkat Dusun Pancasila Nogosari

Dusun Nogosari merupakan salah satu dusun di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Dusun Nogosari terdiri dari 930 penduduk (selopamioro.bantulkab.go.id) yang terbagi dalam 329 Keluarga. Dusun Nogosari cukup beragam baik dari segi agama maupun identitas sosial lainnya. Dusun Nogosari terkena

dampak Gempa Bumi yang melanda Bantul tahun 2006. Dalam proses *recovery* dampak bencana tersebut, Dusun Nogosari termasuk dusun yang paling cepat karena memanfaatkan gotong-royong sebagai modal sosial.

Pada 22 Juni 2016, Dusun Nogosari mendeklarasikan diri sebagai Dusun Pancasila. Deklarasi ini merupakan inisiatif warga yang turut dihadiri dari berbagai kalangan baik pihak pemerintah maupun akademisi. Tujuan deklarasi tersebut ialah untuk mengajak masyarakat luas untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata. Sejak saat itu, Dusun Nogosari dikenal sebagai Dusun Pancasila.

3. Implementasi Pancasila

Jika mengunjungi Dusun Nogosari tampak tidak ada yang berbeda dengan dusun lainnya. Tidak ada ditempel simbol-simbol Pancasila atau lainnya yang menandakan sebagai Dusun Pancasila. Hal itu disebabkan karena dusun tersebut tidak ingin menampilkan Pancasila secara formal dan simbol semata melainkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah implementasi nilai-nilai Pancasila di dusun tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Hal ini ditandai dengan budaya gotong-royong, Pemakaman Umum yang bebas dan tidak terpisah antara umat muslim dan non muslim. Peringatan hari keagamaan secara toleran. **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab:** Saling menghormati satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Hal ini tercermin saling menjenguk jika ada tetangga yang sakit. Tersedianya ambulan sosial yakni pihak tetangga yang punya mobil mengantar tetangga yang sakit ke rumah sakit. **Persatuan Indonesia:**

Gotong-royong. Arisan warga secara keseluruhan tanpa berdasarkan agama. **Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** mengedepankan musyawarah-mufakat dalam setiap diskusi dan rapat-rapat desa. Pemilihan suara hanya menjadi pilihan terakhir. Larangan pemasangan atribut-atribut kampanye di dusun tersebut selama proses pemilu untuk menjaga polarisasi pilihan penduduk. **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Pemerataan bantuan atau subsidi. Jika ada subsidi atau bantuan yang datang namun ada warga yang berhak tidak mendapatkan maka subsidi tersebut akan disisihkan oleh warga untuk dibagikan.

Dusun Nogosari sebenarnya sudah lama mengimplementasikan Pancasila (Untoro, 2019). Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sejak dulu. Artinya, nilai-nilai Pancasila sudah lama hidup sebagai modal sosial warga. Upaya yang dilakukan dalam menjaga komitmen dalam menerapkan sebagai Dusun Pancasila, Dusun Nogosari melakukannya melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dan organisasi pemuda. Tidak ada upaya atau kegiatan khusus dalam melestarikan tersebut selain daripada penerapan kegiatan masyarakat dan pemuda di Nogosari.

Dusun Pancasila hadir atas kritik dalam realisasi nilai-nilai Pancasila yang belum sebagaimana diharapkan. Pancasila lebih dominan secara formalistik dan simbolitas semata. Bahkan, Pancasila juga dijadikan konsumsi politik. Namun, secara realisasi masih jauh dari harapan. Pancasila banyak dibicarakan tapi sedikit dilaksanakan (Untoro, 2019). Kalangan elit belum sepenuhnya serius dan konsisten dalam mengamalkan Pancasila sehingga keteladaan sangat

minim dan menimbulkan apatisme (Armawi, 2007).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan secara nyata merupakan faktor penguat di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pengikat sosial di masyarakat (Heywood, 2017). Hal ini memudahkan masyarakat dalam bergotong-royong, bahu-membahu dalam menghadapi permasalahannya. Contohnya ialah dampak Gempa Bumi 2006 di Bantul.

Kesadaran akan keberagaman dan pentingnya persatuan merupakan modal sosial (*social capital*) yang harus dimiliki. Modal sosial termanifestasikan dalam bentuk kepercayaan, kelembagaan masyarakat, nilai atau norma dan jaringan antar warga maupun antar kelembagaan masyarakat yang ada (Rozikin, 2019). Kekayaan berharga dari Nogosari adalah persatuan dan kesatuan (Untoro, 2019). Modal sosial juga bisa ditandai dengan meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat itu sendiri seiring dengan lemahnya peran negara (Blakeley dalam Blakeley & Bryson, 2002). Modal sosial dengan menjadikan praktik-praktik nilai-nilai Pancasila sebagai modal sosial, maka kehidupan masyarakat akan relatif kondusif dan aman. Sehingga deklarasi Dusun Pancasila bukan suatu awal revitalisasi melainkan manifestasi revitalisasi Pancasila di saat negara atau masyarakat lainnya kurang berperan.

Revitalisasi Pancasila menjadi keniscayaan seiring tantangan kehidupan modern saat ini. Pancasila sebagai ideologi perlu diteguhkan kembali sebagai upaya untuk meneguhkan dan menguatkan kohesi sosial. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menghadapi tantangan yang cukup mengkhawatirkan. Selain masuknya

paparan ideologi-ideologi luar, secara internal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia juga mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Pancasila 2019 dengan sampel 9 (Sembilan) provinsi ditemukan data bahwa Daerah yang memiliki ketahanan **Kuat** adalah Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta; **Sedang**: Maluku, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara; **Rendah**, yaitu Papua Barat dan DKI Jakarta (Maharani, Sutarmanto, & Zubaidi, 2019). Ditambah dari data sejumlah survei yang menyebutkan bahwa kalangan pelajar dan generasi muda sudah terpapar ideologi yang kurang sesuai dengan Pancasila. Dari data tersebut bisa dimaknai bahwa aktualisasi dan implementasi Pancasila memerlukan upaya dan pendekatan baru.

Peran masyarakat penting dalam upaya revitalisasi Pancasila. Revitalisasi yang bersifat *grassroot*, *top-up* menjadi alternatif ketika struktur dan politik negara belum sepenuhnya memberikan keteladanan. Keteladanan merupakan manifestasi terbaik Pancasila. Nilai-nilai, kebiasaan, dan kebudayaan yang ada di masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai upaya merevitalisasi Pancasila. Sebab, nilai-nilai, budaya, dan kearifan lokal tersebut sejatinya memiliki koherensi dan korespondensi dengan nilai Pancasila.

Hal senada dikatakan Setyowati (2019) bahwa pada esensi Pancasila dekat dengan nilai budaya masyarakat dan sudah dipraktikkan atau diamalkan masyarakat. Afirmasinya, revitalisasi ideologi Pancasila bisa dilakukan berdampingan dengan nilai-nilai kearifan lokal (Sumardjoko & Yani, 2013). Pendekatan kultural penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga

kelestarian nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan (Sulasmono, 2019). Hal ini mengafirmasikan pentingnya memperkuat keberadaban publik (*pubic civility*) dengan memperkuat semangat dan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Apa yang dilakukan Dusun Nogosari tersebut patut untuk diapresiasi. Revitalisasi Pancasila bukan sekedar menghidupkan kembali ingatan terhadap nilai-nilainya, tetapi juga melakukan pelembagaan nilai nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai tingkatan kehidupan (Nubowo, 2015). Hal tersebut yang ditunjukkan oleh Dusun Nogosari tersebut. Hal ini pula yang membuatnya berbeda dengan konsep revitalisasi Pancasila yang selama ini diserukan oleh publik.

Dusun-dusun atau komunitas sosial lainnya perlu untuk memiliki semangat dan keberanian yang sama dalam hal revitalisasi Pancasila. Namun demikian, revitalisasi Pancasila harus konsisten dan tidak hanya bersifat teoritis dan seremonial belaka. Pesan penting yang harus dimaknai dari Dusun Nogosari dalam upaya merevitalisasi Pancasila ialah melaksanakan atau merealisasikan nilai-nilai Pancasila secara sederhana dan dalam kehidupan yang terdekat.

Peran publik sangat penting dalam merevitalisasi Pancasila. Masyarakat sipil dalam konsep demokrasi merupakan alternatif gerakan ketika negara dianggap gagal atau kurang maksimal melaksanakan fungsinya. Masyarakat sipil biasanya merupakan gerakan yang bersifat otonom, terorganisasi, sadar nilai, terbentuk dari akar rumput (Hodgson, 2004 dalam Lilleker, 2006). Dalam sifatnya tersebut, masyarakat sipil bisa bersifat alternatif sekaligus kolaboratif.

Implementasi Pancasila secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari akan semakin mengokohkan dasar Pancasila di masyarakat. Pancasila sebagaimana ditegaskan Soekarno ialah nilai-nilai yang sudah lama hidup dalam sejarah nusantara. Sekalipun demikian perlu upaya dan pendekatan lain untuk merevitalisasi Pancasila. Pentingnya pendidikan secara terstruktur di masyarakat juga perlu digalakkan. Perlu digalakkan pendidikan nilai-nilai Pancasila secara kognitif dalam masyarakat melalui berbagai bentuk. “Jika masyarakat di dusun ini ditanya Pancasila satu per satu, mungkin tidak semua hafal. Namun, Pancasila tetap di hati dan dalam kehidupan kami sehari-hari,” (Untoro, 2019).

Keteladanan juga menjadi aspek penting dalam revitalisasi Pancasila. Namun, hendaknya perlu ditambahkan dengan pendekatan secara pengetahuan agar nilai-nilai Pancasila lebih berkembang dan luas. Sehingga tafsir Pancasila lebih terbuka dan lebih mudah dilestarikan dari generasi ke generasi.

D. Simpulan

Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan kepribadian bangsa menghadapi banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini ditandai dengan masuknya paham-paham radikalisme dan pengaruh buruk globalisasi di kalangan muda. Demikian juga tingkat dukungan Pancasila sebagai ideologi menunjukkan penurunan. Hal ini mengafirmasikan pentingnya revitalisasi Pancasila. Dusun Nogosari, Desa Desa Tirenggo, Bantul patut untuk diapresiasi. Keberanian mendeklarasikan diri sebagai Dusun Pancasila ditengah masyarakat yang semakin permisif, memberikan optimisme terhadap aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Dusun Nogosari menerapkan Pancasila secara praksis dalam kehidupan sehari-hari.

Dusun Nogosari tidak terjebak dalam kajian, doktrin, dan perdebatan secara teoritis seperti langkah konvensional selama ini. Dusun Nogosari mengimplementasikan Pancasila secara sederhana dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di dusun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, S. (2009). Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 11(1), 25–50.
- Armawi, A. (2007). Revitalisasi Pancasila dalam Konteks Nation and Character Building. *Jurnal Ketahanan Nasional*, XII(3).
- Blakeley, G., & Bryson, V. (Eds.). (2002). *Contemporary Political Concepts: A Critical Introduction*. London: Pluto Press.
- Camargo, R. (2013). *The New Critique of Ideology*. <https://doi.org/10.1057/9781137329677>
- Dharmaputra, E. (1988). *Pancasila: Identitas dan Modernitas = Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- DHF. (2018, March 7). Survei Alvara: Sebagian Milenial Setuju Khilafah. *CNN Indonesia*.
- Eaglaton, T. (1991). *Ideologi: An Introduction*. London: Verso.
- Fakhrizal, F. (2018, July 17). Survei LSI: Masyarakat Pro Pancasila Menurun, Pendukung NKRI Bersyariah Meningka. <https://Nasional.Okezone.Com/>.
- Freden, M. (2003). *Ideology: A very short introduction*. New Y: Press, Oxford University.
- Heywood, A. (2017). *Political Ideologies*:

- An Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2015a). *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Edisi keli). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2015b). *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Lilleker, D. . (2006). *Key Concepts in Political Communication*. London: SAGE Publications.
- Maarif, A. S. (2006). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Maharani, S. D., Sutarmanto, H., & Zubaidi, A. (2019). Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila Septiana Dwiputri Maharani Baru Ketahanan Nasional dalam Era. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 277–294.
- Nubowo, A. (2015). Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1(1), 61–78.
- Pranarka, A. W. . P. (1985). *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Center For Strategic And International Studies.
- Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 204–225.
- Setyowati. (2019). Strategi Menyelamatkan Pancasila. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/21112671/strategi-menyelamatkan-pancasila?page=all>.
- Sarosa, S. (2012) *Penelitian kualitatif dasa-dasar*. Jakarta: PT Indeks.
- Sugiyono (2015). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmono, B. S. (2019). Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Satya Widya*, 35(1), 75–85.
- Sumardjoko, B., & Yani, J. A. (2013). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui. *Varia Pendidikan*, 25(2), 110–123.
- Therborn, G. (1980). *The Ideology of Power and the Power of Ideology*. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Vincent, A. (2010). Modern Political Ideologies. In *The Philosophical Quarterly* (Vol. 43). <https://doi.org/10.2307/2219917>
- Wahyudi, A. (2006). Jurnal filsafat. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 94–115. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31325/18921>
- Zmantel, J. S. (2008). *Ideology and Politics* (Vol. 3). Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Wawancara: Untoro, (2019) wawancara 14 Desember 2019 Dusun Nogosari, Trenggong, Bantul.